



Parlementaria



3 Dorong Peningkatan *Sister City* RI-RRT



4 Ikut Berkiprah Warnai Kehidupan Bernegara



Apresiasi Peran TNI di Misi Kemanusiaan Gaza



Anggaran Infrastruktur Diplomasi Harus Sinkron di APBN

Nomor 1298/IV/VI/2024 Juni 2024



9 772614 339005



Kembalikan Fungsi Sungai Sebagai Jalur Air

Kembalikan Fungsi Sungai Sebagai Jalur Air

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI meninjau dampak banjir bandang di Padang, Sumatera Barat yang disebabkan oleh meluapnya Sungai Batang Anai, pada Mei 2024 lalu. Dalam tinjauan tersebut, Ketua Komisi IV Sudin melihat langsung dampak banjir yang menyebabkan sebanyak 159 keluarga yang membuka usaha di sekitar aliran Sungai Batang Anai tersebut terdampak.

Sudin mengatakan kejadian serupa terus berulang beberapa tahun terakhir, diakibatkan penyempitan sungai yang terjadi membuat sungai tak mampu menampung aliran air yang seharusnya. Untuk itu, ia mendorong perbaikan dalam berbagai sektor.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk membuat kajian komprehensif terkait bagaimana merelokasi masyarakat yang selama ini membuka usaha di sekitar aliran sungai, sehingga dapat mengembalikan fungsi sungai sebagai jalur air.

"Tadi kami bilang kepada (kementerian) LHK untuk segera membuat kajian, kajian yang bagaimana, apakah di realokasi atau gimana,



Ketua Komisi IV DPR RI Sudin beserta tim saat meninjau dampak banjir bandang.

karena ini melibatkan bukan satu eselon saja, ada Bapeda, ada KSDAE, ada planologi ada yang lain juga," kata Sudin di Padang, Sumatera Barat, Rabu (5/6).

Sementara itu, kepada Kementerian Pertanian, Sudin meminta Kementerian memberi perhatian pada masalah pertanian yang juga

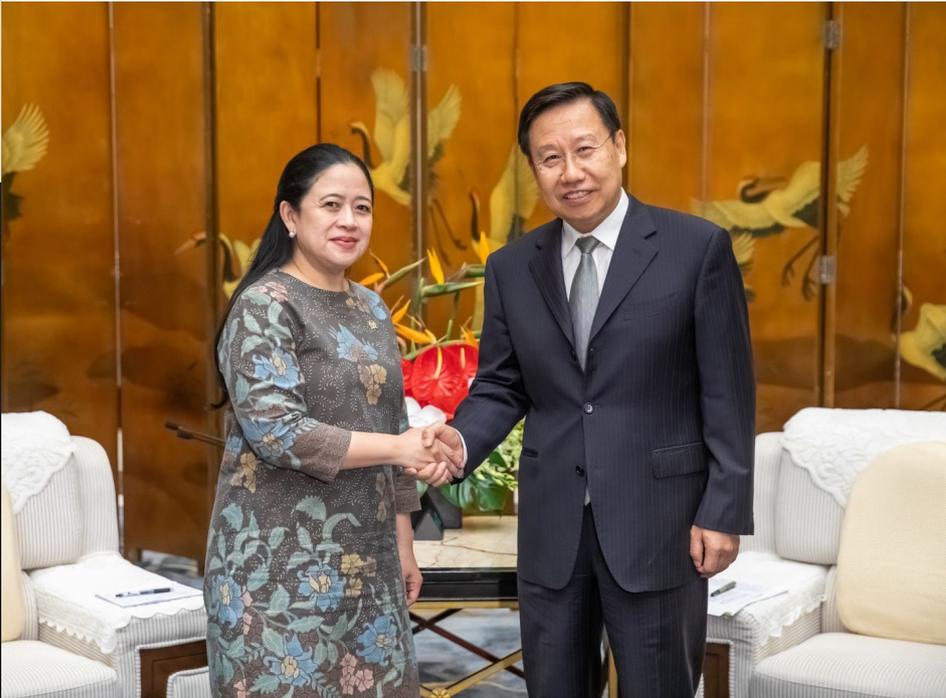
melanda Sumatera Barat akibat erupsi Gunung Marapi. "Ada 600 hektar tanaman padi sawah tidak bisa ditanami, maka nanti dalam rapat kerja akan kami sampaikan juga bagaimana Kementerian Pertanian menindaklanjuti ini, tapi dengan catatan harus ada usulan dari kabupaten maupun provinsi," jelasnya.

Selain itu, Legislator Dapil Lampung ini mengatakan nantinya akan berkoordinasi dengan Komisi V DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam percepatan pembersihan aliran Sungai Batang Anai akibat erupsi Gunung Marapi. Sebab, dampak erupsi tersebut diantaranya terdapat banyak bebatuan yang menyumbat aliran sungai.

— bia/aha



Dorong Peningkatan *Sister City* RI-RRT



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat bertemu dengan Wang Xiaohui, pimpinan parlemen provinsi Sichuan, di Wanda Reign Chengdu.

FOTO: IST/PDT

Pada kunjungan kerjanya ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Ketua DPR RI Puan Maharani juga melakukan pertemuan dengan pimpinan daerah sekaligus pimpinan partai di Provinsi Sichuan, Wang Xiaohui. Pertemuan dilakukan dalam upaya peningkatan kerja sama antara Tiongkok dengan Indonesia.

Pertemuan Puan dengan Wang Xiaohui yang juga merupakan *Chairman of the Standing Committee of Sichuan Provincial People's Congress* (pimpinan parlemen provinsi Sichuan) digelar di Wanda Reign Chengdu, Jumat (31/5). "Terima kasih atas sambutan hangatnya untuk menerima kunjungan saya di Chengdu, kota yang indah ini," kata

Puan di awal sambutannya.

Dalam kesempatan ini, Puan pun mendorong agar kerja sama *sister city* antara Indonesia dan Tiongkok bisa semakin ditingkatkan. Untuk diketahui, RI-RRT menjalin kerja sama *sister city* untuk Kota Chengdu dan Kota Medan.

"Kami berharap ke depan semakin banyak kota-kota di Indonesia bekerjasama dengan Sichuan sebagai *sister city*," ungkap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini. Lebih lanjut, ia mendorong peningkatan kerja sama RI-RRT dalam bidang pariwisata dan obat-obatan herbal. Apalagi, kata Puan, sebelum pandemi Covid-19 wisatawan dari China ke Indonesia cukup besar. **rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



Biro Pemberitaan Parlemen



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, S.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH
Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
M. Ibrurkhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI
Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR
Agung Hidayat, S.I.P., Ridwan Budiman, S.I.P., Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Fadlun Bariyah, Prima Danurtirto, A.Md,
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI
Tiara Saurn, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom,
Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos.,
Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Naden Ivan, S.I.Kom.,
Ubad Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu
Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setiantio,
Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti
Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie,
Balggy Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER
Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budlati, Arief Rachman,
R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldi Opie,
Hasri Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA
Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P,
Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha,
Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayati, Rosnita,
Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah,
Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrusna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Ikut Berkiprah Warnai Kehidupan Bernegara

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra)

Abdul Muhaimin Iskandar atau yang kerap disapa Gus Imin menghadiri bedah buku miliknya berjudul Mandatory Kesejahteraan, Konstitusi dan Mandat Negara. Acara ini digelar di Universitas Wahid Hasyim (Unwahas), Semarang, Jawa Tengah, Kamis (6/6).

Dalam keterangan yang diterima **Parlementaria**, di Jakarta, Gus Imin mengingatkan seluruh mahasiswa Unwahas akan tanggung jawab besar yang mereka pikul. Menurutnya, mahasiswa bukan hanya punya peran memajukan diri sendiri, namun juga harus berkiprah mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Di dalam diri kita ada tanggung jawab terhadap diri kita sendiri maupun sebagai khalifah di muka bumi. Ada juga tanggung jawab bagi kita untuk berkiprah dalam mewarnai kehidupan umat, masyarakat bangsa dan negara,” katanya.



DI DALAM DIRI KITA ADA TANGGUNG JAWAB TERHADAP DIRI KITA SENDIRI MAUPUN SEBAGAI KHALIFAH DI MUKA BUMI. ADA JUGA TANGGUNG JAWAB BAGI KITA UNTUK BERKIPRAH DALAM MEWARNAI KEHIDUPAN UMAT, MASYARAKAT BANGSA DAN NEGARA.

Abdul Muhaimin Iskandar

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra)



Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar saat menghadiri bedah buku miliknya di Universitas Wahid Hasyim (Unwahas), Semarang, Jawa Tengah, Kamis (6/6/2024).

Politisi PKB ini menyatakan, buku Mandatory Kesejahteraan merupakan trilogi buku Kesejahteraan Rakyat yang ia tulis berdasarkan

pengalaman, perenungan, juga kajian mendalam. “Buku ini merupakan trilogi dari buku Kesejahteraan Rakyat yang menjadi bagian dari perenungan sekaligus pengalaman selama saya memimpin DPR RI di bidang Kesra hasil dialog dan pertemuan saya dengan banyak kalangan,” ungkap Gus Imin.

Lebih lanjut, Legislator Dapil Jawa Timur VIII ini menyampaikan bahwa buku tersebut ditulisnya tak lepas dari pengalaman pribadi sebagai santri kader hingga politisi. Tak lupa, ia pun menyisipkan pengalaman-pengalamannya saat berkiprah di pemerintahan sebagai eksekutif maupun legislatif.

uc/rdn

Scan QR untuk berita selengkapnya



Apresiasi Peran TNI di Misi Kemanusiaan Gaza

Komisi I DPR RI mengapresiasi peran yang telah dilakukan TNI dalam mengirimkan bantuan misi kemanusiaan maupun rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina. Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid yang menjadi salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Wakil Menteri Pertahanan Panglima TNI, M. Herindra, terkait dukungan pemerintah kepada Palestina.

"Kami apresiasi lebih dahulu dari Kementerian Pertahanan dan

TNI yang sudah dengan segala upaya membantu misi kemanusiaan, terutama juga ketika membawa bantuan dari udara yang waktu itu dilepas oleh Pak Menhan Prabowo," ujar Meutya dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Menhan dan Panglima TNI di Ruang Rapat Kerja Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6).

Diketahui, Sabtu (1/6/2024) lalu, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menyatakan akan siap mengirim pasukan RI, penjaga perdamaian di Gaza, Palestina. Hal ini ia sampaikan saat menjadi pembicara di *The International Institute*

for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2024, Singapura.

Adapun dalam kesimpulan Rapat Kerja lainnya, dibacakan pula bahwa Komisi I DPR RI mendukung pengiriman Pasukan Pemelihara Perdamaian TNI dan Rumah Sakit Lapangan (Rumkitlap) ke Gaza, Palestina serta mengevakuasi dan merawat korban sipil dalam rangka misi perdamaian dunia berdasarkan mandat dari Perserikatan Bangsa Bangsa. "Dan meminta TNI menyelesaikan berbagai persiapan yang diperlukan terkait misi tersebut," imbuhnya. — **hal/rdn**



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid saat foto bersama sebelum mengikuti Rapat Kerja Komisi I dengan Menhan dan Panglima TNI di Ruang Rapat Kerja Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

FOTO: RSB/PDT

Anggaran Infrastruktur Diplomasi Harus Sinkron di APBN

Komisi I DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Rapat tersebut salah satunya membahas terkait Anggaran Infrastruktur Diplomasi dan Sarana-Prasarana, yang merupakan tindak lanjut Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi I DPR RI ke beberapa Perwakilan Ri di Luar Negeri.

Adapun komponen Anggaran Infrastruktur Diplomasi terdiri dari Anggaran Infrastruktur Diplomasi Tunjangan dan Dasar Fasilitas Pegawai di Perwakilan, Angka Dasar Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (ADTLN), Angka Pokok Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (APTPLN) yang sesuai jenjang gelar diplomatik dan golongan PNS, Tunjangan Penghidupan Suami Istri, Tunjangan Anak, Fasilitas Sewa Rumah, dan Restitusi Pengobatan.

Menanggapi itu, Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menyoroti terkait penyesuaian Anggaran Infrastruktur Diplomat tersebut yang disusun oleh Kemlu. Ia menekankan agar jangan sampai rencana yang akan dilaksanakan



Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi.

di 2025 mendatang ini belum terkoordinasi dan tersinkronisasi dengan Kementerian Keuangan maupun kebijakan pemerintah.

“Jadi kita juga tadi ingin mendalami apakah dalam APBN tahun

2025 itu sudah merefleksikan ADTLN baru atau masih yang me-*refer* kepada Perpres di tahun 2019? Karena kalau APBN ini digunakan dengan satuan yang baru itu kan harus ada payung hukumnya,” ujar Bobby di sela-sela Rapat Kerja Komisi I DPR RI Bersama Menteri Luar Negeri Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusan-tara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tidak bisa anggaran yang baru digunakan apabila masih menggunakan payung hukum yang lama. Maka dari itu, menurutnya, perlu ada sinkronisasi dan harmonisasi.



TIDAK BISA ANGGARAN YANG BARU DIGUNAKAN APABILA MASIH MENGGUNAKAN PAYUNG HUKUM YANG LAMA. MAKA DARI ITU, MENURUTNYA, PERLU ADA SINKRONISASI DAN HARMONISASI.

Bobby Adhityo Rizaldi

Anggota Komisi I DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



hal/rdn

Panggil Pemerintah Soal Mundurnya Kepala IKN

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengaku belum mengetahui secara pasti mengenai pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN). Namun, ia menyatakan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan mengagendakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait untuk membahas hal ini lebih lanjut.

“Saya belum tahu persis ya, Kepala Otorita IKN mengundurkan diri. Namun, nanti di Jakarta akan diadakan agenda pertemuan dengan pihak-pihak yang terkait, terutama otoritas IKN dan mungkin juga Menteri Sekretaris Negara. Kami ingin mendengarkan langsung apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Doli di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (4/6).

Doli menekankan bahwa yang paling mengetahui alasan pengunduran diri tersebut adalah Kepala



FOTO: SIS/PDI

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Gubernur, Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (4/6/2024).

Otorita IKN sendiri. Meskipun demikian, ia menilai bahwa selama ini kinerja otoritas tersebut

sudah sesuai dengan target yang ditentukan oleh pemerintah.

“Sebenarnya, yang paling tahu soal mundur atau tidak mundurnya, serta alasan di balik itu, adalah Kepala Otorita IKN itu sendiri. Tapi saya melihat, terlepas dari apa alasan mundurnya, selama ini apa yang sudah dikerjakan oleh otoritas tersebut sudah sesuai dengan target yang ditentukan oleh pemerintah,” jelasnya.

Ahmad Doli juga mengungkapkan bahwa tim di dalam Otorita IKN sudah terbentuk dengan cukup kuat, sehingga berbagai program dan proyek di IKN dapat berjalan dengan baik. Ia menyebutkan bahwa perkembangan IKN akan terus dipantau, terutama dalam kaitannya dengan rencana pemerintah untuk melaksanakan upacara bendera pertama kali di IKN pada 17 Agustus mendatang. **gys/aha**

SEBENARNYA, YANG PALING TAHU SOAL MUNDUR ATAU TIDAK MUNDURNYA, SERTA ALASAN DI BALIK ITU, ADALAH KEPALA OTORITA IKN ITU SENDIRI. TAPI SAYA MELIHAT, TERLEPAS DARI APA ALASAN MUNDURNYA, SELAMA INI APA YANG SUDAH DIKERJAKAN OLEH OTORITAS TERSEBUT SUDAH SESUAI DENGAN TARGET YANG DITENTUKAN OLEH PEMERINTAH.

Ahmad Doli Kurnia
Ketua Komisi II DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Jangan Intervensi KPU di Pilkada Serentak 2024

Anggota Komisi II DPR RI Gusparda Gaus meminta KPU di seluruh tingkatan daerah agar bekerja profesional dan berintegritas dalam mempersiapkan tahapan Pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 Nomer 2024 mendatang. Karena itu, ia menegaskan jangan ada pihak yang mencoba mengintervensi KPU dalam rangka menyelenggarakan Pilkada yang Jujur dan Adil (Jurdil) dan Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (Luber).

"Tentu kita berharap KPU mempersiapkan langkah-langkah agar pelaksanaan Pemilu ini betul-betul sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan UU (agar) bagaimana Pemilu itu dilaksanakan jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. (Juga) KPU tidak diintervensi dari pihak manapun, bekerja secara profesional berintegritas," jelas Gusparda di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi II DPR RI dalam rangka meninjau persiapan pelaksanaan



Anggota Komisi II DPR RI Gusparda Gaus saat Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi II DPR RI dalam rangka meninjau persiapan pelaksanaan Pilkada serentak di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (4/6/2024).

Pilkada serentak di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (4/6).

Di sisi lain, ia pun berharap adanya sinergi antara KPUD dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

untuk bertukar informasi data kependudukan, khususnya data pemilih, yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) setempat. Ia menegaskan, jangan sampai terjadi lagi warga yang sudah meninggal namun masih tercatat dalam data pemilih (*voter*).

"Hari ini mereka bisa menjadi pemilih, besok bisa (jadi) berstatus sebagai orang yang tidak berhak memilih. Pun sebaliknya. Artinya data pemilih itu kan sangat dinamis. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian KPU dalam meng-*input* data, dan Bawaslu tentu harus memberikan masukan dan saran jangan sampai abai terhadap kedinamisan dari pemilih itu," harap Politisi Fraksi PAN ini. 



HARI INI MEREKA BISA MENJADI PEMILIH, BESOK BISA (JADI) BERSTATUS SEBAGAI ORANG YANG TIDAK BERHAK MEMILIH. PUN SEBALIKNYA. ARTINYA DATA PEMILIH ITU KAN SANGAT DINAMIS. OLEH KARENA ITU, PERLU KEHATI-HATIAN KPU DALAM MENG-*INPUT* DATA, DAN BAWASLU TENTU HARUS MEMBERIKAN MASUKAN DAN SARAN JANGAN SAMPAI ABAI TERHADAP KEDINAMISAN DARI PEMILIH ITU.

Guspardi Gaus

Anggota Komisi II DPR RI

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Peluang Revisi UU KPK Masih Terbuka

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto membuka peluang revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Dia beralasan selama ini banyak komplain tentang kewenangan KPK dan Dewas. Pernyataan tersebut dia ungkapkan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang rapat Komisi III DPR RI, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6).

“Kita paham betul karena seperti tadi dikatakan bahwa Undang-Undang Dewas ini lahirnya kan mendadak, Pak. Kita juga ikut di lapangan, Pak. Jadi usulannya kalau Pak Tumpak nanti bisa menyampaikan, coba *dong* diperbaiki revisinya UU 19/2019 seperti ini, kita akan senang sekali, Pak,” kata Bambang Pacul, sapaan akrab Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

UU KPK pernah direvisi pada tahun 2019, dan mengundang kritik dari sejumlah pihak. Kritikan terhadap UU KPK itu datang dari Ketua Dewan Pengawas (Dewas)



Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto, saat memimpin RDP bersama Dewas KPK di ruang rapat Komisi III DPR RI, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Tumpak Hatorangan Panggabean. Alasannya, karena UU tersebut dianggap tak memberikan wewenang yang jelas bagi Dewas untuk melakukan penindakan etik.

“Kita bisa lakukan revisi karena

ini sudah tahun 2019 juga Undang-Undang nya, sudah 5 tahun *lah*, bisa kita tata ulang. Karena banyak yang komplain juga,” ungkap Bambang Pacul.

Dalam kesempatan tersebut, Dewas KPK menyoroti sejumlah hal terkait kinerja pimpinan lembaga antirasuah. Salah satunya, pimpinan KPK dinilai kerap membatasi dan membicarakan hal negatif soal Dewas. Bambang Pacul memastikan keluhan-keluhan Dewas terhadap pimpinan KPK juga akan disampaikan oleh DPR.

“Nanti ketika rapat dengan pimpinan KPK saya sampaikan juga apa yang dikeluhkan Dewas supaya nanti *clear*, jangan terus-menerus ribut, Pak,” ujar Bambang Pacul.

— **ssb/aha**



KITA BISA LAKUKAN REVISI KARENA INI SUDAH TAHUN 2019 JUGA UNDANG-UNDANGNYA, SUDAH 5 TAHUN LAH, BISA KITA TATA ULANG. KARENA BANYAK YANG KOMPLAIN JUGA.

Bambang Wuryanto

Ketua Komisi III DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Usulan Pengadaan Kantor Perwakilan DPD Harus Dievaluasi

Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding mengungkapkan, bahwa ia tidak pernah memberikan dukungan tentang rencana pengadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) untuk membangun kantor perwakilan di tiap provinsi. Menurutnya rencana tersebut harus dievaluasi.

Ia dengan tegas menyampaikan jangan sampai ada pemborosan dalam penggunaan anggaran. "Saya tidak pernah memberikan dukungan kepada DPD, terhadap pembangunan kantor DPD di daerah, karena saya anggap itu pemborosan," tandas Sarifuddin saat rapat dengan Sekjen DPD RI membahas tentang rancangan dan evaluasi anggaran, di ruang rapat Komisi III DPR RI, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (10/6).

Politisi PAN menjabarkan 38 provinsi jika dibangun kantor perwakilan DPD diikuti dengan



Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding (kiri) saat mengikuti rapat dengan Sekjen DPD RI membahas tentang rancangan dan evaluasi anggaran, di Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024).

pengadaan pegawainya dimulai dengan pejabat dan staf, maka akan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. "Pengadaan kantor, begitu juga dengan staf dan unsur

manajemen pendukung lainnya, tentunya itu mengeluarkan biaya yang sangat besar, tidak sedikit, 38 provinsi. Ketika kantor DPD di daerah diadakan lalu yang di pusat untuk apa. Staf-staf yang ada di sini kerjanya apa," papar Sarifuddin.

Ia pun menegaskan agar usulan anggaran pengadaan kantor perwakilan DPD di daerah untuk dievaluasi kembali. "Makanya ketika ini diusulkan lagi penambahan anggaran untuk kebutuhan belanja operasional pengisian dan penempatan sumber daya manusia, pejabat, dan pegawai sejumlah 566 orang di seluruh kantor DPD RI, kan besar ini. Tentu ada pengangkatan baru bagi para pejabat-pejabat di kantor DPD di seluruh provinsi, nah tentunya ini perlu dilakukan evaluasi kembali, Ketua," jelasnya. **ssb/aha**



PENGADAAN KANTOR, BEGITU JUGA DENGAN STAF DAN UNSUR MANAJEMEN PENDUKUNG LAINNYA, TENTUNYA ITU MENGELUARKAN BIAYA YANG SANGAT BESAR, TIDAK SEDIKIT, 38 PROVINSI. KETIKA KANTOR DPD DI DAERAH DIADAKAN LALU YANG DI PUSAT UNTUK APA. STAF-STAF YANG ADA DI SINI KERJANYA APA.

Sarifuddin Sudding

Anggota Komisi III DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Perjuangkan Peningkatan Anggaran BMKG dan BNPP

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BMKG, dan Kepala BNPP. Dalam rapat ini Komisi V mengevaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024 Sampai Bulan Mei 2024, lebih lanjut rapat ini juga melakukan Pembicaraan Pendahuluan RKA K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2025. Secara umum Komisi V akan memperjuangkan peningkatan anggaran BMKG dan BNPP/Basarnas untuk membiayai program prioritas nasional.

“Komisi V DPR RI bersama dengan BMKG dan BNPP/ Basarnas akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis Masyarakat, sesuai mekanisme pembahasan RUU tentang APBN TA 2025 di DPR RI,” papar Roberth di ruang rapat Komisi



FOTO: MUNPDT

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw saat memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BMKG, dan Kepala BNPP di Senayan, Jakarta, Kamis (5/6/2024).

V, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (5/6).

Dalam rapat ini juga diungkapkan bahwa, Komisi V DPR RI mendukung

upaya BMKG dalam rangka peningkatan dan pemenuhan anggaran khususnya Kedeputusan Bidang Modifikasi Cuaca demi mencegah kerugian negara akibat KARHUTLA yang pada tahun 2015 sebesar Rp220 triliun.

Lebih lanjut, Komisi V DPR RI mendukung upaya BNPP/Basarnas untuk peningkatan anggaran demi pemenuhan standar sarana, prasarana dan SDM SAR yang telah menjadi keharusan. Tak hanya itu Komisi V DPR RI sepakat dengan BMKG dan BNPP/ Basarnas untuk menyesuaikan program dan kegiatan berskala nasional termasuk program berbasis masyarakat dalam RAPBN TA 2025 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. **ssb/rdn**



KOMISI V DPR RI BERSAMA DENGAN BMKG DAN BNPP/ BASARNAS AKAN MEMPERJUANGKAN PENINGKATAN ANGGARAN UNTUK MEMBIAYAI PROGRAM-PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PROGRAM BERBASIS MASYARAKAT, SESUAI MEKANISME PEMBAHASAN RUU TENTANG APBN TA 2025 DI DPR RI.

Roberth Rouw

Wakil Ketua Komisi V DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya





Deddy Sitorus Minta Pelita Air Turunkan Harga Tiket

Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk menurunkan harga tiket Pelita Air. Sebab, menurutnya, harga tiket Pelita Air sedikit lebih mahal dari kompetitor lainnya seperti TransNusa, Lion Air, dan Super Air Jet.

“Harga tiket Pelita Air cenderung lebih mahal dibandingkan kompetitor sekelasnya,” pungkas Deddy dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri BUMN di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (7/6).

Berdasarkan pengamatan beberapa kali, harga tiket Pelita Air dan maskapai *Low Cost Carrier (LCC)* lainnya memang rata-rata selisih Rp50 ribu hingga Rp100 ribuan. Meskipun tipis, selisih harga ini akan membuat calon penumpang berpikir ulang dan bisa jadi pindah



Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus saat mengikuti Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri BUMN di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (7/6/2024).



JIKA MASKAPAI YANG RUTENYA MASIH SEDIKIT, SEPERTI PELITA AIR YANG HANYA TERBANG DUA HINGGA TIGA KALI SEHARI, BIASANYA MEMANG LEBIH TEPAT WAKTU. AKAN TETAPI, KALAU SUDAH ADA MASALAH TEKNIS, DELAY-NYA PUN BISA SANGAT LAMA KARENA JUMLAH PESAWAT PENGGANTINYA TERBATAS.

Deddy Yevri Hanteru Sitorus

Anggota Komisi VI DPR RI



ke maskapai lain jika Pelita Air tidak menawarkan *benefit* lain ke penumpang.

“Jika dibiarkan seperti ini terus nanti penumpang kabur sebaiknya pikirkan langkah-langkah agar harga tiket semakin terjangkau,” ungkap Deddy.

Ia menuturkan jika maskapai yang rutanya masih sedikit, seperti Pelita Air yang hanya terbang dua hingga tiga kali sehari, biasanya memang lebih tepat waktu. Akan tetapi, kalau sudah ada masalah teknis, *delay*-nya pun bisa sangat lama karena jumlah pesawat penggantinya terbatas.

“Perbanyak pesawatnya agar jika ada masalah penumpang tidak menunggu terlalu lama,” pungkasnya. **tn/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya



MIND ID Diminta Sampaikan Rencana Berjangkanya

Anggota Komisi VI DPR RI Jon Erizal meminta BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Holding Industri Pertambangan Indonesia, Mining Industry Indonesia (MIND ID) membuat *roadmap* jangka pendek, menengah dan jangka panjang dalam hal pengelolaan pertambangan di Indonesia. Hal ini dinilai penting untuk mengetahui bagaimana rencana dan potensi dari pertambangan Indonesia ke depannya.

Terlebih, beberapa waktu belakangan, ada ada dua kasus besar di BUMN Pertambangan yang menimpa PT Timah dan PT Antam yang terjadi akibat buruknya tata kelola di internal perusahaan.

"Saya berkali-kali menyampaikan kepada BUMN ini agar menyampaikan rencana kerjanya itu ada *short term*, *medium term* dan *long term* ke kita. Jadi waktu duduk membahas kinerja seperti ini ada acuan, *loh* tahun lalu katanya 3 tahun ini akan tumbuh seperti ini," kata Jon dalam RDP dengan MIND ID, di Gedung



Anggota Komisi VI DPR RI Jon Erizal saat mengikuti RDP dengan MIND ID, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (5/4/2024).

Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (3/6).

Selain itu, rencana berjangka

tersebut juga dinilai penting mengingat pertambangan merupakan salah satu sumber penerimaan negara, dimana BUMN berperan besar dalam memanfaatkan hasil tambang untuk menambah penerimaan negara. Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah yang menargetkan sasaran pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen.

"Karena sumber penerimaan negara itu kalau tergantung pajak saja, pajak yang dinaikin, sekarang kan sudah naik nih, pasti beban rakyat meningkat. Kemudian dari PNBPN juga terbatas. Nah harapan kita adalah dividen dari BUMN ini yang berperan besar untuk menopang itu semua," jelas Jon. **bia/aha**



SAYA BERKALI-KALI MENYAMPAIKAN KEPADA BUMN INI AGAR MENYAMPAIKAN RENCANA KERJANYA ITU ADA *SHORT TERM*, *MEDIUM TERM* DAN *LONG TERM* KE KITA. JADI WAKTU DUDUK MEMBAHAS KINERJA SEPERTI INI ADA ACUAN, *LOH* TAHUN LALU KATANYA 3 TAHUN INI AKAN TUMBUH SEPERTI INI.

Jon Erizal

Anggota Komisi VI DPR RI



Scan QR untuk berita selengkapnya



Perketat Mitra Tender Produksi Migas

Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru berharap proses tender terhadap mitra kerja dalam pengadaan tender barang dan jasa proses produksi Migas (minyak dan gas) diperketat. Ia menekankan, jangan sampai tender ini memasukkan mitra yang tidak memiliki kecakapan dalam bidangnya.

“Dalam sektor Migas, penggunaan TKDN (Tingkat Kandungan Negeri) sudah lima puluh persen. Sehingga tetap membutuhkan pengadaan, dan itu hal yang sangat *urgan*. Oleh karena itu, persyaratan pengetatan harus diutamakan,” ujar Falah saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan SKK Migas dan PT Pertamina di ruang rapat Komisi VII, Gedung Nusantara I, DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (6/6).

Dilanjutkan Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini, pengetatan terhadap proses tender harus dilakukan. Namun jangan sampai proses tersebut membuat produksi terhambat, atau tidak berjalan dengan baik.



FOTO: GER/PTD

Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan SKK Migas dan PT Pertamina di DPR RI Senayan, Jakarta.

Ia mencontohkan mesin-mesin pompa yang berasal dari Cina. Jangan sampai, tambahnya, produk tersebut berkualitas rendah sehingga

tidak sesuai harapan. Lebih lanjut, ia pun berharap agar ada pembicaraan lebih lanjut melalui Panja Migas untuk membahas lebih detail terkait menurunnya *lifting* atau produksi Migas dalam negeri, meskipun selama ini Pertamina telah berusaha untuk bisa meningkatkan *lifting* Migas.

Oleh karena itu, dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil ketua Komisi VII DPR RI, Bambang Hariyadi, Komisi VII DPR RI sepakat untuk melakukan pendalaman secara menyeluruh atas kinerja SKK Migas dan Pertamina. Terutama terkait ketidaksinkronan antara peningkatan biaya pengadaan barang dan jasa melalui *cost recovery*, serta penurunan *lifting* Migas setiap tahunnya melalui Panja Migas. **ayu, rio/rdn**



DALAM SEKTOR MIGAS, PENGGUNAAN TKDN (TINGKAT KANDUNGAN NEGERI) SUDAH LIMA PULUH PERSEN. SEHINGGA TETAP MEMBUTUHKAN PENGADAAN, DAN ITU HAL YANG SANGAT URGAN. OLEH KARENA ITU, PERSYARATAN PENGETATAN HARUS DIUTAMAKAN.

Nasyirul Falah Amru

Anggota Komisi VII DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Siap Optimalkan Pengawasan Pelaksanaan Haji 2024

DPR RI melalui Tim Pengawas (Timwas) Haji sebagai pengawas eksternal berkomitmen untuk mengawal penuh pelaksanaan pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia oleh pemerintah agar dapat berjalan dengan optimal. Anggota Timwas Haji DPR RI, Marwan Dasopang menyampaikan tambahan kuota jemaah haji sebanyak 20.000 di tahun ini, tentunya perlu diantisipasi dengan baik oleh pemerintah agar tidak menimbulkan masalah.

Menurutnya hasil evaluasi pelaksanaan haji tahun sebelumnya dapat menjadi perbaikan pelayanan di titik-titik yang berpotensi timbul permasalahan salah satunya saat prosesi ibadah di Arafah, Mina, dan Mudzaliyah.

“Kami mendorong pemerintah apa yang menjadi kesepakatan (terkait pelayanan) dengan Panja



Anggota Timwas Haji DPR RI, Marwan Dasopang saat diwawancarai Parlementaria jelang keberangkatan Timwas Haji DPR RI tahap I ke Mekkah, Arab Saudi, Kamis (6/6/2024).

itu bisa dilaksanakan dengan baik,” ujar Marwan, saat ditemui jelang

keberangkatan Timwas Haji DPR RI tahap I ke Mekkah, Arab Saudi, Kamis (6/6).

Wakil ketua Komisi VIII DPR RI ini menambahkan *tagline* dari pemerintah terkait haji ramah lansia juga harus konsisten untuk diimplementasikan di lapangan salah satunya adalah kesigapan para petugas haji. Marwan meminta petugas haji dapat berkonsentrasi penuh membantu jemaah haji jika mengalami kendala saat akan beribadah.

“Maka petugas yang diberangkatkan ini, cobalah konsentrasi menjadi petugas, jangan mengutamakan ibadah, karena melayani jemaah itu ibadah, maka jemaah kita yang kesasar atau hilang bisa segera ditemukan atau mencegah supaya jemaah kita tidak kesasar,” tutup Marwan. tvr/aha



KAMI MENDORONG PEMERINTAH APA YANG MENJADI KESEPAKATAN (TERKAIT PELAYANAN) DENGAN PANJA ITU BISA DILAKSANAKAN DENGAN BAIK,” UJAR MARWAN, SAAT DITEMUI JELANG KEBERANGKATAN TIMWAS HAJI DPR RI TAHAP I KE MEKKAH, ARAB SAUDI.

Marwan Dasopang

Anggota Timwas Haji DPR RI



Scan QR untuk berita selengkapnya



Perhatikan Gizi Makanan untuk Jemaah Haji

Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR memberikan catatan terkait dengan kandungan gizi dari makanan yang disediakan pihak catering untuk para jemaah haji. Hal ini terungkap saat Timwas DPR RI melakukan kunjungan ke salah satu perusahaan penyedia catering yakni Nooha for Catering Services Company Al Hijrah di Distric Syuran, Sy.Qubaa, Madinah pada Sabtu (8/6).

Anggota Timwas Haji DPR Andi Yuliani Paris menyampaikan kondisi makanan yang disediakan untuk jemaah haji kurang berimbang dari segi gizi karena kandungan karbohidrat yang berlebihan. Menurutnya perlu perhitungan yang matang agar kebutuhan kalori, lemak, protein serta vitamin dan mineral dapat terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, Anggota Komisi VII DPR RI ini meminta penambahan protein hewani dalam makanan untuk jemaah haji agar meningkatkan ketahanan



FOTO: SGT/PDT

Anggota Timwas Haji DPR Andi Yuliani Paris saat mengecek bahan makanan ke salah satu perusahaan penyedia catering yakni Nooha for Catering Services Company Al Hijrah di Distric Syuran, Sy.Qubaa, Madinah, Sabtu (8/6/2024).

fisik mereka saat menjalankan ibadah.

“Kenapa dua protein hewani itu penting atau lemak dari hewan itu

penting karena dia lebih bisa menahan lapar lebih cepat lama diolah di dalam proses metabolisme tubuh. Jadi ke depannya semoga protein hewani ya atau lemaknya juga bisa ditambah sehingga itu akan meningkatkan kualitas gizi para jemaah,” ujarnya.

Legislator Fraksi PAN ini menambahkan selain protein, vitamin dan mineral juga perlu diperhatikan dengan menambahkan asupan jus selain air mineral yang diterima oleh jemaah haji. Senada dengan Andi, Anggota Timwas Haji DPR lainnya, Luluk Nur Hamidah, juga menyoroti berlimpahnya karbohidrat pada makanan jemaah haji. Menurut Luluk perlu pengukuran asupan gizi yang sesuai, agar produktivitas jemaah dalam beribadah menjadi optimal. **tvr/aha**

KENAPA DUA PROTEIN HEWANI ITU PENTING ATAU LEMAK DARI HEWAN ITU PENTING KARENA DIA LEBIH BISA MENAHAN LAPAR LEBIH CEPAT LAMA DIOLAH DI DALAM PROSES METABOLISME TUBUH. JADI KE DEPANNYA SEMOGA PROTEIN HEWANI YA ATAU LEMAKNYA JUGA BISA DITAMBAH SEHINGGA ITU AKAN MENINGKATKAN KUALITAS GIZI PARA JEMAAH.

Andi Yuliani Paris

Anggota Timwas Haji DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Kaji Peluang BUMN Ekspor Bahan Makanan

Tim Pengawas (Timwas) DPR menyoroti peluang pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengambil peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan haji, salah satunya lewat penyediaan bahan makanan untuk jemaah haji.

Anggota Timwas Haji DPR RI Luluk Nur Hamidah menyampaikan selain mendapatkan benefit, langkah ini tentunya juga membuka peluang BUMN untuk menjajaki bisnis terkait dengan pelaksanaan haji. Menurut Luluk, besarnya jumlah jemaah haji Indonesia yang mencapai ratusan ribu setiap tahunnya menjadi hal yang positif untuk terus digali terkait dengan kebutuhannya.

"Kita juga akan meminta kepada BUMN pangan kita seperti ID FOOD atau RNI untuk melihat kemungkinan sekaligus juga peluang bagi perbaikan tahun-tahun yang akan datang



Anggota Timwas Haji DPR, Luluk Nur Hamidah saat melakukan inspeksi ke salah satu perusahaan catering di Madinah, Sabtu (8/6/2024).



PEMERINTAH HARUS JELI MELALUKAN REVIEW PERJANJIAN PERDAGANGAN ANTARA INDONESIA DAN ARAB SAUDI, AGAR UPAYA INDONESIA UNTUK MASUK KE DALAM SISTEM PENYEDIA PENYELENGGARAN HAJI DAPAT BERJALAN MAKSIMAL.

Luluk Nur Hamidah

Anggota Timwas Haji DPR RI

khususnya yang kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan pangan bagi para jemaah haji kita," kata Luluk disela sela kunjungan ke salah satu perusahaan catering di Madinah, Sabtu (8/6).

Luluk menambahkan pemerintah harus jeli melakukan *review* perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Arab Saudi, agar upaya Indonesia untuk masuk ke dalam sistem penyedia penyelenggaraan haji dapat berjalan maksimal. Legislator fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengaku siap dari sisi DPR selaku pemangku kebijakan dari sisi pengawasan, untuk menyelesaikan jika nanti muncul kendala di lapangan. **tv/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Pemondokan di Madinah Butuh Perbaikan

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, memberikan kritik terhadap fasilitas pemondokan jemaah haji Indonesia di Hotel Huda Taiba, Madinah. Saat mengunjungi hotel tersebut pada Sabtu (8/6), Marwan menyatakan bahwa meskipun ada peningkatan fasilitas dibanding tahun lalu, masih terdapat sejumlah masalah yang harus segera diatasi.

“Pelaksanaan ibadah haji tahun ini lebih baik dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu, beberapa jemaah kita dikeluarkan dari hotel karena kontrak sudah selesai. Mereka merasa belum cukup karena sebagian besar *booking time* hanya 8 hari. Jika pesawat *delay*, akan timbul perselisihan karena jemaah merasa baru 7 hari, padahal kontrak 8 hari,” kata Marwan.

Marwan juga menyoroti masalah kapasitas kamar. “Dalam keputusan Panja, maksimal 5 orang per kamar. Meskipun orang Indonesia cenderung



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang saat meninjau fasilitas pemondokan jemaah haji Indonesia di Hotel Huda Taiba, Madinah.



PELAKSANAAN IBADAH HAJI TAHUN INI LEBIH BAIK DIBANDINGKAN TAHUN LALU. TAHUN LALU, BEBERAPA JEMAAH KITA DIKELUARKAN DARI HOTEL KARENA KONTRAK SUDAH SELESAI. MEREKA MERASA BELUM CUKUP KARENA SEBAGIAN BESAR BOOKING TIME HANYA 8 HARI.

Marwan Dasopang

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI

rapi, sering mandi, dan menggunakan banyak air, lebih dari 5 orang akan menyebabkan masalah di kamar mandi. Kita sepakat paling banyak 5 orang (per kamar), tapi dalam situasi tertentu bisa saja 6 orang. Ini akan menyebabkan antrean di kamar mandi panjang,” jelasnya.

Selain itu, Marwan menekankan pentingnya pengecekan ulang fasilitas hotel untuk gelombang kedua jemaah haji setelah pelaksanaan ibadah di Mekah. “Nanti pada tahap kedua, kita akan cek lagi fasilitas hotel untuk jemaah Indonesia. Kita akan pastikan apakah fasilitas tersebut sesuai dengan kesepakatan,” ujarnya. **skr/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Tingkatkan Fasilitas Kesehatan Embarkasi Ramah Lansia

Sebagai perwakilan rakyat yang salah satunya membidangi kesehatan, Komisi IX DPR RI memastikan tiap-tiap warga negara terjamin kesehatannya. Salah satunya, dalam memastikan kesehatan setiap warga negara Indonesia yang akan berangkat ibadah haji dan pulang kembali Tanah Air dengan selamat.

Usai pertemuan, Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana saat diwawancarai **Parlementaria** disela kunjungan kerja spesifik ke Embarkasi Palembang, Asrama Haji Provinsi Sumatera Selatan, Senin (3/6) menyatakan pihaknya fokus mendorong pemerintah mempersiapkan kesehatan calon jemaah. Mulai dari prosedur hingga sarana-prasarana fasilitas yang dibutuhkan terlebih dalam mewujudkan ramah lansia.

Sehingga dengan demikian, tandas Legislator Dapil Sumatera Selatan II itu, diharapkan kualitas pelaksanaan proses di embarkasi haji di Palembang pada khususnya dan



FOTO: PUN/PTI

Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana saat mengikuti kunjungan kerja spesifik ke Embarkasi Palembang, Asrama Haji Provinsi Sumatera Selatan, Senin (3/6/2024).

Indonesia pada umumnya semakin baik untuk menjamin calon jemaah haji yang semakin sehat terlebih untuk lansia.

“Tadi dibicarakan tentang ramah lansia. Ramah lansia itu disiapkan untuk menjaga kondisi lansia, sehingga dapat secara maksimal melaksanakan ibadah yang memakan rentang waktu yang cukup lama,” ungkap Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Menutup wawancara, Sri Meliyana menilai pelaksanaan embarkasi haji secara keseluruhan berdasarkan pengamatannya di Sumatera Selatan sudah baik dan perlu beberapa hal lagi untuk ditingkatkan. “Sehingga mereka akan berhaji secara maksimal dan pulang sebagai hajjah mabrur dan haji mabrur,” pungkasnya.

pun/aha



TADI DIBICARAKAN TENTANG RAMAH LANSIA. RAMAH LANSIA ITU DISIAPKAN UNTUK MENJAGA KONDISI LANSIA, SEHINGGA DAPAT SECARA MAKSIMAL MELAKSANAKAN IBADAH YANG MEMAKAN RENTANG WAKTU YANG CUKUP LAMA.

Sri Meliyana

Anggota Komisi IX DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Perhatikan Perpustakaan di Sekolah Kristen dan 3T

Anggota Komisi X DPR RI Anita Jacoba Gah menyoroti terkait program penguatan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas layanan perpustakaan di sekolah-sekolah Kristen. Menurut Anita, sejauh ini perpustakaan di sekolah-sekolah Kristen belum mendapatkan bantuan yang cukup dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Padahal, menurutnya, di daerah masih banyak perpustakaan sekolah-sekolah Kristen yang sangat membutuhkan bantuan.

“Tetapi ada juga sekolah-sekolah Kristen yang sangat membutuhkan bantuan perpustakaan-perpustakaan,” kata Anita dalam RDP Komisi X DPR RI dengan Plt. Kepala Perpusnas di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6).

Anita menilai sejauh ini bantuan penguatan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas layanan perpustakaan untuk sekolah



FOTO: OJ/PPDT

Anggota Komisi X DPR RI Anita Jacoba Gah saat mengikuti RDP Komisi X DPR RI dengan Plt. Kepala Perpusnas di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024).



BAGAIMANA DENGAN SEKOLAH KRISTEN? APAKAH TIDAK PERLU DIBANTU? APAKAH TIDAK PERLU DIPERHATIKAN? JADI SAYA MINTA KALAU BICARA SOAL ANGGARAN NEGARA HARUSNYA BERPEGANG PADA KEADILAN SOSIAL.

Anita Jacoba Gah
Anggota Komisi X DPR RI

Kristen sangat minim dibandingkan dengan bantuan pengembangan perpustakaan madrasah dan perguruan tinggi, yang jumlahnya sebanyak 111 perpustakaan selama tahun 2024.

“Bagaimana dengan sekolah Kristen? Apakah tidak perlu dibantu? Apakah tidak perlu diperhatikan? Jadi saya minta kalau bicara soal anggaran negara harusnya berpegang pada keadilan sosial,” kata Legislator Dapil NTT II ini.

Dalam rapat ini, Politisi Fraksi Partai Demokrat ini juga meminta Plt. Perpusnas E. Aminudin Aziz untuk juga memperhatikan banyaknya masalah perpustakaan sekolah yang dihadapi di daerah 3T.

we, um/rdn

Scan QR untuk berita selengkapnya



Sepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025

Komisi XI DPR RI bersama pemerintah menyepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Target Pembangunan yang akan menjadi dasar perancangan APBN tahun 2025. Rapat kerja yang menjadi bagian dari agenda Pembicaraan Pendahuluan RAPBN tahun 2025 tersebut diselenggarakan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6).

"Komisi XI bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia dan Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan menyepakati besaran Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Target Pembangunan dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN tahun 2025," kata Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir seraya membacakan kesimpulan rapat kerja tersebut.



Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir saat memimpin Rapat Kerja Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).



KOMISI XI BERSAMA MENTERI KEUANGAN, MENTERI PPN/ KEPALA BAPPENAS, GUBERNUR BANK INDONESIA DAN KETUA DK OTORITAS JASA KEUANGAN MENYEPAKATI BESARAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO DAN TARGET PEMBANGUNAN DALAM PEMBICARAAN PENDAHULUAN RAPBN TAHUN 2025.

Kahar Muzakir

Ketua Komisi XI DPR RI

Berdasarkan kesepakatan rapat antara Komisi XI DPR RI dan pemerintah terkait asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2025 bahwa target pertumbuhan ekonomi telah ditetapkan pada kisaran 5,1 persen - 5,5 persen, sementara target inflasi berada pada kisaran 1,5 persen - 3,5 persen.

Terkait nilai tukar Rupiah, awalnya pemerintah mengajukan pada rentang Rp15.300-Rp15.900/US\$. Namun, sesuai hasil pembahasan Panitia Kerja, nilai tukar yang disepakati berada dalam kisaran Rp 15.300-Rp 15.900/US\$. Sedangkan untuk tingkat suku bunga Surat Berharga Negara 10 tahun yang akan dirilis pada tahun 2025, pemerintah bersama DPR menetapkan target di tingkat sebesar 6,9 persen - 7,2 persen.

uc/rdn

Scan QR untuk berita selengkapnya



RI Pererat Hubungan dengan Belgia Lewat Jalur Pendidikan

Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia-Belgia Abdul Fikri Faqih menyampaikan, pentingnya memperkuat hubungan antar masyarakat untuk meningkatkan hubungan kedua negara. Pimpinan Komisi X DPR RI ini berpandangan bahwa hal ini dapat dilaksanakan melalui kerja sama pendidikan, pernyataan tersebut dia ungkapkan saat berdiskusi dengan Duta Besar Belgia untuk Republik Indonesia Frank Felix.

“Kedepannya, saya mendorong kedua negara untuk meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan ini karena kita mempunyai peluang yang besar untuk mempererat hubungan antar masyarakat,” papar Fikri Faqih di ruang tamu Dubes, Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6).

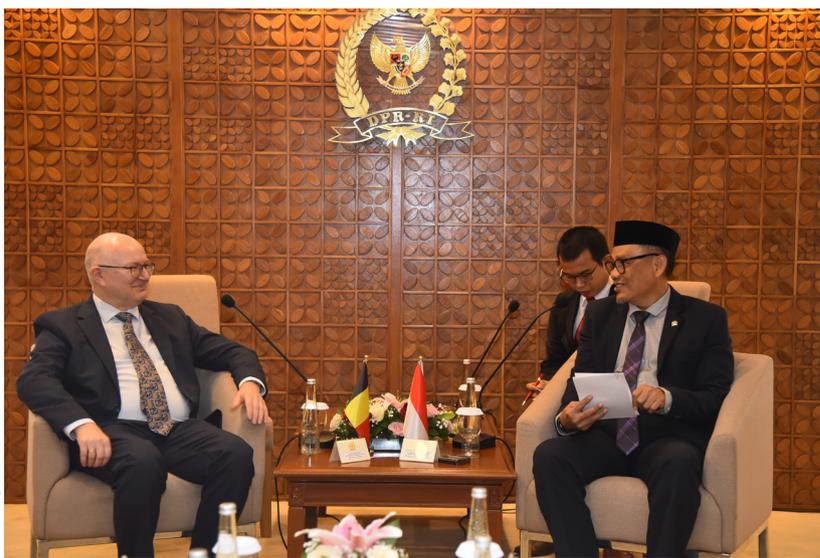


FOTO: RSB/PDT

Ketua GKSB Indonesia-Belgia Abdul Fikri Faqih di sela-sela pertemuan bilateral dengan Duta Besar Belgia untuk Republik Indonesia Frank Felix di ruang tamu Dubes, Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6/2024).



Dalam hal ini, Indonesia dan Belgia telah melakukan kerjasama di bidang pendidikan, baik antar perguruan tinggi (*university to university*) dalam format *joint research*, pertukaran pelajar, maupun kerjasama antar institusi seperti pendidikan vokasi.

Kerja sama yang telah terjalin

selama ini antara lain adalah Ghent University dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Institut Pertanian Bogor (IPB). Indonesia juga menjadi salah satu negara yang menerima manfaat dari program beasiswa pendidikan di Belgia bernama VLIR-UOS, dari Pemerintah Flanders Belgia.

sb/aha



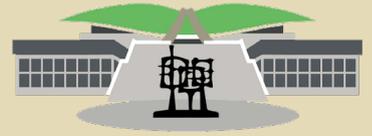
KEDEPANNYA, SAYA MENDORONG KEDUA NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN INI KARENA KITA MEMPUNYAI PELUANG YANG BESAR UNTUK MEMPERERAT HUBUNGAN ANTAR MASYARAKAT.

Abdul Fikri Faqih

Ketua GKSB Indonesia-Belgia

Scan QR untuk berita selengkapnya





**Sekretaris
Jenderal DPR RI
Indra Iskandar
saat memimpin
rapat koordinasi di
Ruangan Pansus C,
Gedung Nusantara
III, DPR RI, Senayan,
Jakarta, Selasa
(11/6/2024).
FOTO: PRIMA**

